

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai klasifikasi saham dengan hak suara multipel di perusahaan terbuka tercantum dalam POJK Nomor 22 Tahun 2021. Mekanisme ini ditujukan bagi emiten yang memiliki inovasi serta pertumbuhan tinggi dan melakukan penawaran umum atas efek ekuitas berupa saham. Selain itu, perusahaan juga wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, serta regulasi pasar modal lainnya yang relevan. Peraturan mengenai saham dengan klasifikasi hak suara multipel bertujuan untuk melindungi kendali yang dimiliki oleh pendiri perusahaan terbuka guna menjaga visi dan misi jangka panjang perusahaan. Namun, di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan perhatian terhadap kepentingan finansial pemegang saham minoritas dari kalangan publik yang turut perlu dijaga. Oleh karena itu, sangat penting untuk

Raisha Cantika Mutiara, 2025

PERLINDUNGAN HUKUM SERTA KEBERLAKUAN DILUSI EFEK OLEH EMITEN BIDANG USAHA TEKNOLOGI DENGAN KLASIFIKASI SAHAM HAK SUARA MULTIPLEL PASCA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (IPO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum - S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

memastikan adanya mekanisme pengawasan dan perlindungan guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam penerapan sistem hak suara multipel ini. Sehingga melalui POJK Nomor 22 Tahun 2021 diatur mengenai keberlakuan-keberlakuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas diantaranya batasan hak suara maksimal, keterlibatan pemegang saham biasa dalam RUPS, klasifikasi suara dalam agenda tertentu persetujuan pemegang saham independen dan transparansi dan keterbukaan informasi.

2. Keberlakuan mengenai dilusi saham milik seluruh pemegang saham pada emiten yang memberlakukan klasifikasi saham dengan hak suara multipel diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2021 yang mengatur mengenai penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel (*Multiple Voting Shares/MVS*) bagi emiten yang memiliki tingkat inovasi dan pertumbuhan yang tinggi serta melakukan penawaran umum atas saham. Meskipun peraturan ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah dilusi saham, substansi pengaturannya mencakup ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan dilusi kepemilikan, khususnya terhadap pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam aksi korporasi. Dalam hal penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**HMETD**), Pasal 24 POJK Nomor 22/POJK.04/2021 mengatur bahwa pemegang saham dengan hak suara multipel (**SHSM**) wajib menyampaikan pernyataan terkait pelaksanaan

Raisha Cantika Mutiara, 2025

PERLINDUNGAN HUKUM SERTA KEBERLAKUAN DILUSI EFEK OLEH EMITEN BIDANG USAHA TEKNOLOGI DENGAN KLASIFIKASI SAHAM HAK SUARA MULTIPLE PASCA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (IPO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum - S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

haknya beserta bukti kecukupan dana. Jika hak tersebut dilaksanakan oleh pihak selain yang berwenang memiliki SHSM, maka saham yang diterbitkan akan berubah status menjadi saham biasa. Sementara itu, dalam penambahan modal tanpa HMETD (**PMTHMETD**) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 POJK Nomor 22/POJK.04/2021, ditetapkan rasio hak suara SHSM terhadap saham biasa sebesar 40:1, yang menunjukkan dominasi hak suara tetap berada pada pemegang SHSM meskipun terjadi penambahan modal. Dengan demikian, peraturan ini secara tidak langsung mengatur risiko terjadinya dilusi saham, terutama bagi pemegang saham minoritas yang tidak berpartisipasi dalam aksi korporasi, sehingga penting untuk memastikan adanya transparansi dan perlindungan terhadap hak-hak investor publik.

B. Saran

Penguatan Mekanisme Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat secara berkelanjutan memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap emiten yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel (Multiple Voting Shares/MVS). Penguatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham pengendali serta menjamin prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas dalam struktur tata kelola perusahaan terbuka. Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi juga diharapkan dapat

Raisha Cantika Mutiara, 2025

PERLINDUNGAN HUKUM SERTA KEBERLAKUAN DILUSI EFEK OLEH EMITEN BIDANG USAHA TEKNOLOGI DENGAN KLASIFIKASI SAHAM HAK SUARA MULTIPLE PASCA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (IPO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum - S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

menjadi hal yang perlu diperhatikan, Emiten yang menerapkan sistem saham dengan hak suara multipel seyogyanya diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan mudah diakses oleh publik. Informasi tersebut meliputi struktur kepemilikan saham, proporsi hak suara, serta potensi dilusi kepemilikan. Peningkatan keterbukaan ini menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan investor serta menghindari terjadinya asimetri informasi di pasar modal.

Diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk memperkuat landasan hukum yang secara tegas dan eksplisit melindungi kepentingan ekonomi pemegang saham minoritas. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembatasan terhadap kewenangan pemegang saham dengan hak suara multipel dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan tanpa keterlibatan pemegang saham biasa.

Evaluasi berkala atas efektivitas implementasi POJK Nomor 22 Tahun 2021, mengingat bahwa penerapan sistem hak suara multipel merupakan kebijakan yang relatif baru dalam rezim pasar modal Indonesia, maka diperlukan evaluasi secara berkala oleh OJK bersama para pemangku kepentingan terkait. Evaluasi tersebut penting untuk menilai efektivitas peraturan serta mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul, termasuk risiko dilusi kepemilikan saham dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Peningkatan literasi investor publik, pemerintah dan otoritas pasar modal disarankan untuk memperluas program literasi dan edukasi kepada investor publik mengenai karakteristik saham dengan hak suara multipel. Pengetahuan ini mencakup pemahaman terhadap risiko-risiko yang melekat, termasuk kemungkinan terjadinya dilusi saham, agar investor dapat membuat keputusan investasi yang cerdas dan berbasis pada informasi yang memadai.